

JUDUL

**Kontestasi Kepentingan Dalam Perumusan Peraturan Daerah
Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di
Kabupaten Gresik**

SKRIPSI



Disusun oleh

Muhammad Bagus Balghi

NIM : 071411333022

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Genap 2017/2018

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapat gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Maret 2018



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow meter stamp. The stamp is labeled 'METERAI TEMPEL' and '6000 ENAM RIBURUPIAH'. It also features a barcode and the number 'RFB0C3AFF044262371'. The signature is written in a stylized, cursive manner.

(Muhammad Bagus Balghi)

**Kontestasi Kepentingan Dalam Perumusan Peraturan Daerah Tentang
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik**

SKRIPSI

Maksud : Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi S1 pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Disusun Oleh

Muhammad Bagus Balghi

NIM: 071411333022

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Genap Tahun 2017/2018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Mengucap syukur kepada Allah SWT dengan tuntunan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih atas berbagai momen dalam kegiatan intelektual dengan berbagai bentuk dukungan dari orang tua, dosen, rekan-rekan serta sahabat-sahabat berpikir bersama. Tak patut rasanya jika dalam skripsi ini tidak menghadirkan individu atau kelompok yang berperan besar dalam memberikan inspirasi dan dukungan kepada penulis saat pengerjaannya.

1. Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Joko Urip dan Ibu Ninuk Rochmania yang telah membesarkan penulis hingga bisa mengeyam bangku perkuliahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, Pak dan Buk atas kasih sayang yang kau berikan dengan tak henti-hentinya menuntun penulis dengan hal yang konstruktif dan solutif.
2. Teruntuk adik-adikku, Aimatul Ayu Maghfiroh, Shibghotur Ayu Robbaniyah, Muhammad Bagus Ismy Syarif semangat kuliah dan sekolahnya. Segera diselesaikan tanggung jawab akademisnya dengan baik dan selalu ingat bapak dan ibu di rumah.
3. Terima kasih kepada PT. Petrokimia Gresik yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dalam menempuh pendidikan tinggi, semoga nantinya penulis juga mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk keberlanjutan dari PT. Petrokimia. Terus Memupuk Kesuburan, Menebar Kemakmuran.
4. Bapak Drs. Priyatmoko, MA. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini sehingga bisa dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Bapak Budi Prasetyo selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan masukan dalam setiap awal semester sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Departemen Politik yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan selama melakukan studi di Ilmu Politik.
7. Bapak Khoirul Huda selalu Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik yang dengan besar hati mengajarkan dan memberikan data untuk kebutuhan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, khususnya Bapak Pramudya Rum yang ramah dan santun serta memberikan pembelajaran yang begitu berharga kepada penulis.
9. Teman berpikir bersama di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik (HIMAPRODI ILMU POLITIK) 2017, Zam-Zam Isnan Nasution terima kasih telah menemani massa bakti yang begitu singkat. Dengan semangat dan begitu keyakinan meskipun dalam kepengurusan yang tidak mendapatkan legalitas.
10. Rekan-rekan Badan Pengurus Harian, Ketua Divisi dan seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik (HIMAPRODI ILMU POLITIK) 2017 yang berjuang bersama dalam melepaskan HIMA dari *frozen* dan telah menggores cerita untuk kedjayaan. *Ayo Melangkah Bersama Menuju Kedjayaan!*
11. Badan Pengurus Harian Pusat Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia 2016/2017, Ketua Umum Renaldy Akbar dan Bendahara Umum Muhammad Maskur. Jerih payah kita bisa mendapatkan SK ya, *pak*.
12. Seluruh Pengurus Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2016, Dewan Legislatif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2016
13. Kepada Mas Widya Regsha, Mas Lavica Anky Rieswanda dan Mbak Lidya Victoria Pandiangan yang telah memberikan proses pembelajaran begitu luar biasa bagi penulis.
14. *Arek-Arek* kontrakan *Bhinneka* yang telah menemani penulis selama kuliah, Sigit Gozali, Oktavian Hasyim Khairuddin Putra, Muhammad Mustasim, Sofwan Nasrudin.

15. Kisanak beronani jiwa di Partai Senja, Abrizal Pradyawan, Sri Harini Wijayanti, Alifia Safira, Benedictus Andre Setiawan, Andaru Raharjo, Rizal Ilham Surur, Teguh Andi Raharjo, Bobby Tanaya, Ghilman Faisal, Robbyan Abel dan kisanak-kisanak Senja yang lain. Terima kasih atas perjuangan belajar bersama dalam tataran politik kampus.
16. Sahabat-Sahabati di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Airlangga yang selalu mengajak penulis untuk berdiskusi dan telah memberi banyak bekal intelektual sebagai pribadi yang “*progresif-transformatif*”. Senantiasa bersemi dan tumbuh subur dengan tangan terkepal dan maju ke muka.
17. Dulur-Dulur Ilmu Politik 2014, khususnya M. Ikvin Rosyadi, Iga Ayu Rizka Fauziah, Virginia Jessicasari, Gandis Saraswati, Majid Almas Amajida, Himbo Wahyu Setiawan, Aulia Sylvany, Eksayoga Amirul dan rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih atas hiburan dan senda gurau di GAPOL sebagai obat kejenuhan dalam kegiatan kuliah.
18. Teman yang selalu menjadi pengingat tuk ibadah menjaga kesadaran, terima kasih teman-teman BSO Penalaran dan Bara FISIP.
19. Teman hidup sebulan dalam Kuliah Kerja Nyata – Belajar Bersama Masyarakat (KKN-BBM) Universitas Airlangga ke 56 di Desa Nglawak, Kertosono Nganjuk, Abynurogo, Zavira Pramasita Widyanti Putri, Hikmah Putri Sary, Erza Tania Dewanti, Novia Mir R. S., Nurul Amirah Binti Alios, Eny Coolfina S., Kretawiweka Nuraga S. Dan Farie Rachmat Chusmana.
20. Serta teman yang selalu ada dan memberi semangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini, Marsya Martia.

Seluruh rekan dan sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bentuk koreksi dan masukan kepada penulis untuk bisa berkembang. Senantiasa dalam jiwa yang bebas untuk berkembangnya jati diri.

MOTTO

**“Banyak Dari Filsuf Hanya Mampu Membaca Dunia
Tetapi Sedikit yang Mampu Merubah Dunia”**

-Le Jeune Karl Marx-

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONTESTASI KEPENTINGAN DALAM PERUMUSAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA LOKAL DI KABUPATEN GRESIK**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan.

Dosen Pembimbing



Drs. Priyatmoko, M.A.

NIP. 195608181981031006

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan di hadapan Komisi Penguji

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Pada hari : Rabu
Tanggal : 9 Mei 2018
Pukul : 15.00 – 17.00

Komisi Penguji terdiri dari :

Ketua Penguji



Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si

NIP. 195806011985021001

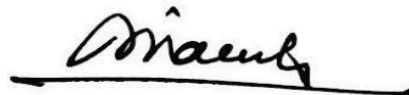
Anggota



Ali Sahab, S.IP., M.Si

NIP. 198206032009121001

Anggota



Drs. Priyatmoko, M.A.

NIP. 195608181981031006

ABSTRAK

Secara fungsional, ilmu politik mempelajari terkait fungsi dari lembaga politik dalam menentukan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai keputusan politik bukanlah produk mudah dibuat. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik merupakan produk politik yang dalam perumusannya melalui berbagai tahapan dan melibatkan berbagai kelompok-kelompok. Kelompok yang ada saling berinteraksi dan berkontestasi terkait dengan kepentingan dari tiap kelompoknya. Interaksi antar kelompok tersebut terjadi melalui pola *bargaining* dengan bentuk *co-operatif* dan *accomodation* yang menghasilkan suatu bentuk kesepakatan baru dengan mempertimbangkan kepentingan tiap-tiap kelompok. Kelompok-kelompok tersebut mulai dari *Elected Officials*, *Business*, *Labour Organization* hingga *Technocratic Official*. Interaksi dilakukan adalah dengan tujuan tercapainya bentuk peraturan daerah yang ideal, seperti yang dikatakan oleh Thomas R. Dye bahwa dalam perumusan kebijakan yang melibatkan kelompok-kelompok harus didasarkan pada interaksi antar kelompok yang ada di dalam untuk menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan tersebut adalah yang terbaik. Akan tetapi realitasnya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Sehingga senyatanya akan terdapat kelompok yang diuntungkan dan dirugikan. Dikatakan sebagai kelompok yang diuntungkan karena kepentingan kelompoknya lebih banyak diakomodir dalam peraturan daerah, begitu pun sebaliknya bagi kelompok yang dirugikan. Sehingga dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kontestasi kepentingan politik yang terjadi antara kelompok dalam perumusan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik.

Kata Kunci : *Perumusan Kebijakan, Kebijakan Publik, Kepentingan, Interaksi Antar Aktor, Peraturan Daerah*

ABSTRACT

In functional manners, political science studies the political institution in determining a public policy. Public policy as a political decision is not easy to make. Gresik's Local Regulation on The Protection and Placement of Local Workers is one of political decisions which in its formulation involved several stages and groups. Each group has interest and it is contested through facilities that have been provided, also the group demands the others for doing interaction that can accommodate each interest. Interactions among the group has happened over the bargaining to the cooperation and accommodation that produce a new agreement with considering the interests of every groups. The groups are the Elected Officials, the Business, the Labour Organization, until the Technocratic Official. The purpose for doing the interaction is achieving the ideal form of local regulation. This study use descriptive qualitative method with in-depth interview technique, also use the purposive and snowball sampling technique in determining potential subject to answer the problems. For analysing the data, the researcher utilizes Thomas R. Dye's model formulation theory which said, in the formulation of policies that include several groups should be based on the intergroup interaction to develop the balance. However, it is hard to be realized. There will be a group that benefited and disadvantaged. The group can be benefited because the interests of its group more accommodated in local regulation and for group that disadvantaged it less accommodated. This study explains how political interests competition that occurred between the groups in Gresik's Local Regulation on The Protection and Placement of Local Workers formulation

Keywords: Policy Formulation, Public Policy, Interests, The Interaction of Inter Actors, Local Regulation

KATA PENGANTAR

Otonomi daerah merupakan kritik terhadap sistem sentralisasinya kekuasaan yang tidak memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan di daerahnya. Pemerintah daerah diberikan hak otonom untuk menyelenggarakan berbagai urusan di tingkat daerah yang bertujuan secara langsung mampu mengatasi berbagai persoalan di daerah, tidak lagi seperti konsep pemerintahan di daerah saat orde baru. Adanya tuntutan dari masyarakat daerah kepada pemerintah daerah untuk mencari solusi akan permasalahan yang terjadi. Sehingga pemerintah daerah berlomba-lomba bagaimana caranya agar masyarakat yang ada dalam daerahnya dapat dilindungi dan dipastikan kesejahteraannya, termasuk di Kabupaten Gresik.

Kabupaten yang terletak di provinsi paling timur Pulau Jawa menjadikannya sebagai daerah yang mampu memberikan fasilitas kepada investor dalam menanamkan modalnya. Mulai dari jalur darat yang berada dalam akses nadi ekonomi pulau Jawa yaitu pantai utara, serta jalur laut yang memberikan sarana pelabuhan internasional sebagai pusat roda ekonomi Indonesia bagian timur. Selain secara geografis yang memberikan mimpi indah bagi pengusaha, iklim kebijakan yang ada pun sangat mendukung untuk menjadikan Gresik sebagai daerah yang ramah investasi. Oleh karena itu Gresik dipandang sebagai daerah yang potensial bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi di bidang industri. Tak ada salah jika Gresik dinobatkan sebagai Kota Industri yang hingga saat ini terdapat 1.383 perusahaan berdiri.

Perkembangan industrialisasi di Gresik yang begitu pesat membuat penulis tertarik untuk melihat kondisi sosial dari masyarakat lokal yang ada dalam wilayah geografis dan iklim kebijakan yang ramah investasi. Realitasnya masyarakat lokal sejatinya tidak merasakan langsung dampak dari industrialisasi. Asumsinya perkembangan industri yang pesat mampu menampung jumlah angkatan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik. Realitas yang terjadi

ternyata industrialisasi tak memberikan solusi untuk mengatasi pengangguran di Gresik yaitu dengan jumlah pengangguran yang terus naik mulai dari 2011 hingga 2015. Oleh karenanya diperlukan bentuk intervensi dari pemegang kekuasaan di Gresik untuk mengatasi permasalahan pengangguran, salah satunya yaitu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gresik. Intervensi dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik. Peraturan daerah sebagai solusi mengatasi pengangguran tersebut dirumuskan dengan tujuan lain yaitu memaksimalkan potensi Gresik sebagai Kota Industri dan menekan ketimpangan antara tenaga kerja lokal dan on-lokal.

Oleh karena itu begitu menarik untuk menjelaskan bagaimana perumusan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran ini dilakukan. Konteks politik dalam perumusan peraturan daerah dihadirkan oleh penulis melalui kelompok-kelompok yang dilibatkan dalam perumusan serta interaksi antar kelompok yang ada dalam sudut pandang kontestasi kepentingannya. Dalam bab 1 memberikan ruang bagi pembaca untuk memahami latar belakang sosial yang terjadi di Kabupaten Gresik. Memunculkan pertanyaan penelitian sebagai hal yang hendak dijelaskan oleh penulis serta menjelaskan teori perumusan kebijakan model kelompok dipilih oleh penulis dalam menjelaskan realitas politik yang terjadi.

Bab 2 penulis menyajikan gambaran umum dari Kabupaten Gresik mulai dari sebagai kota industri yang berdampak pada persoalan ketenagakerjaan dan pengangguran. Kemudian di respons oleh DPRD Kabupaten Gresik dengan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik. Dalam Bab 3 diberikan temuan-temuan data baik melalui *indept interview* ataupun data yang diperoleh berupa dokumen. Berisi tentang penjelasan atas realitas politik yang ditemukan oleh penulis, menjelaskan terkait dengan latar belakang adanya peraturan daerah hingga dinamika yang terjadi dalam perumusan peraturan daerah.

Pada Bab 4 penulis menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab sebelumnya dengan mengelaborasi temuan data yang dianalisis menggunakan teori

perumusan model kelompok. Analisis yang menekankan pada pola perumusan model kelompok yang diikuti dengan interaksi antar kelompok untuk tercapainya suatu konsensus sehingga dapat disahkannya peraturan daerah ini. Kemudian terakhir penulis memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan membahas terkait dengan menjawab rumusan masalah dan saran sebagai bentuk rekomendasi penulis terkait dengan peraturan daerah serta menjelaskan kekurangan dari teori perumusan model kelompok.

Hingga pada akhirnya skripsi ini telah usai, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan kepada rekan berpikir, sahabat-sahabati yang senantiasa dalam pergerakan serta dosen atau staf pengajar yang memberikan kritik dan saran yang konstruktif kepada penulis. Akhir kata penulis ucapkan, *wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq.*

Surabaya, 20 Maret 2018

Muhammad Bagus Balghi

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	ii
Halaman Pengungkapan Maksud Penulisan Skripsi	iii
Halaman Persembahan	iv
Motto	vii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing	viii
Halaman Pengesahan Panitia Penguji	ix
Abstrak	x
Abstract	xi
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel, Grafik dan Gambar	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	I-1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	I-10
1.3. Tujuan Penelitian	I-10
1.4. Manfaat Penelitian	I-11
1.5. Kerangka Konseptual dan Teori	I-12
1.5.1. Kerangka Konseptual	I-12
1.5.1.1. Ketenagakerjaan	I-12
1.5.1.2. Otonomi Daerah	I-13
1.5.1.3. Kelompok Kepentingan (<i>Interest Group</i>)	I-14
1.5.1.4. Kebijakan Publik	I-16
1.5.1.5. Dimensi Interaksi Antar Aktor	I-20
1.5.2. Kerangka Teori	I-27
1.5.2.1. Teori Perumusan Kebijakan	I-27

1.6. Metode Penelitian	I-30
1.6.1. Fokus Penelitian	I-30
1.6.2. Tipe Penelitian	I-30
1.6.3. Subjek Penelitian	I-31
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	I-34
1.6.5. Teknik Analisis Data	I-36
 BAB II KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GRESIK	
2.1. Gresik Sebagai Kota Industri	II-1
2.2. Ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik	II-4
2.3. Kondisi Pengangguran di Kabupaten Gresik	II-7
2.4. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik	II-10
 BAB III KELOMPOK DAN DINAMIKA DALAM PERUMUSAN PERATURAN DAERAH	
3.1. Latar Belakang Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik	III-1
3.1.1. Optimalisasi Potensi di Kabupaten Gresik	III-7
3.1.2. Pengangguran di Kabupaten Gresik	III-8
3.1.3. Kesenjangan Tenaga Kerja Lokal dan Non-Lokal	III-10
3.2. Kelompok dalam Perumusan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal	III-12
3.2.1. Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik	III-13
3.2.2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	III-15
3.2.3. Kelompok Bisnis (<i>Business</i>)	III-16
3.2.4. Organisasi Buruh (<i>Labour Organization</i>)	III-17
3.2.5. Akademisi (<i>Technocratic Official</i>)	III-18
3.3. Kepentingan Kelompok dalam Perumusan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik	III-19

3.3.1. Kelompok Pendukung	III-19
3.3.2. Kelompok Oposisi	III-24
3.3.3. Peta Koalisi Kepentingan Kelompok	III-26
3.4. Dinamika Perumusan Peraturan Daerah Tentang Perindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik	III-27

BAB IV KONTESTASI KEPENTINGAN ANTAR KELOMPOK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN MODEL KELOMPOK

4.1. Model Kelompok dalam Peraturan Daerah Tentang Perindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik	IV-1
4.2. Kontestasi Kepentingan dalam Perumusan Peraturan Daerah Tentang Perindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik	IV-12
4.3. Implikasi Teori	IV-21
4.4. Implikasi Peraturan Daerah	IV-22

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Saran	V-4

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR**Daftar Tabel**

Tabel 1.1.	Kategorisasi subjek penelitian	I-31
Tabel 3.1.	Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik	III-14
Tabel 3.2.	Kelompok Bisnis (<i>Bussines</i>)	III-16
Tabel 3.3.	Kelompok Organisasi Buruh (<i>Labour Organization</i>)	III-18
Tabel 3.4.	Kelompok Akademisi (<i>Technocratic Officials</i>)	III-19
Tabel 3.5.	Kronologi Pembahasan Peraturan Daerah	III-32

Daftar Grafik

Grafik 1.1.	Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik tahun 2011 – 2013	I-3
Grafik 1.2	Jumlah Perusahaan di Gresik.....	I-4
Grafik 2.1.	Pertumbuhan perusahaan di Gresik pada tahun 2011 – 2016	II-3
Grafik 2.2.	Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja yang terpenuhi	II-7
Grafik 2.3.	Jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik	II-8

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Gresik	II-2
-------------	-----------------------------	------

Gambar 3.1.	Tahap pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik	III-6
Gambar 3.2.	Peta koalisi kepentingan kelompok	III-26
Gambar 4.1.	Kelompok dalam perumusan	IV-4
Gambar 4.2.	Interaksi Perumusan Peraturan Daerah I	IV-17
Gambar 4.3.	Interaksi Perumusan Peraturan Daerah II	IV-20